

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi dalam lingkup pemerintahan, baik yang ada di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, telah mengalami berbagai perubahan dari sejak berdirinya Indonesia. Kustiani dan Hamzah (2014), dalam bukunya yang berjudul *Seri Akuntansi Pemerintah (Buku 1)*, menguraikan sejarah sistem akuntansi di Indonesia mulai dari masa kemerdekaan. Sistem akuntansi saat itu didasarkan pada aturan warisan dari Belanda, yakni *Indonesische Comptabiliteitswet Stbl.* 1864 No. 106, yang dituangkan terakhir dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1968. Sistem akuntansi tersebut digunakan sampai pada tahun 2003, hingga reformasi keuangan negara yang ditandai dengan diterbitkannya 3 (tiga) Undang-Undang Keuangan Negara yang juga menandakan reformasi akuntansi pemerintahan. Perubahan pada sistem akuntansi pemerintahan ditandai dengan mulai diterapkannya sistem akuntansi berbasis akrual dari yang awalnya berbasis kas. Perubahan penerapan basis akuntansi ini tentunya memerlukan waktu yang lama sehingga digunakan Basis Kas Menuju Akrual atau *Cash Toward Accrual* dalam proses peralihannya.

Selain perubahan terhadap basis akuntansi, terdapat juga perubahan-perubahan lain, salah satunya adalah sistem pencatatan yang awalnya menggunakan *single entry* menjadi *double entry* (pp. 4-10). Dinamika akuntansi pemerintah yang telah diuraikan di atas merupakan bagian reformasi keuangan negara dalam rangka mewujudkan praktik *good governance* sehingga dapat mencapai pengelolaan keuangan negara yang baik (Suryanto, 2018, p. 196).

Terkait pengelolaan keuangan negara, dilansir dari *kemenkeu.go.id*, sudah menjadi tugas dari Kementerian Keuangan dalam mengurus urusan keuangan pemerintahan. Dalam Kementerian Keuangan terdapat 11 eselon I, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) adalah salah satu yang memiliki tugas khusus di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah (Kementerian Republik Indonesia, n.d.). Berdasarkan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam menjalankan tugasnya di seluruh wilayah Indonesia, DJPb memiliki instansi vertikal di berbagai daerah di Indonesia, yakni Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb. Kanwil DJPb secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (p. 2). Di bawah Kanwil DJPb terdapat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil dan bertugas sebagai instansi vertikal DJPb tingkat UAKPB dan juga selaku Kuasa BUN yang menjamin terlaksanannya penyaluran dana APBN serta penatausahaan penerimaan ke kas negara dan pengeluaran dana dari kas negara (p. 17).

Salah satu KPPN di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado, yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado atau sering disebut dengan

singkatan KPPN Manado. Dilansir dari *djpb.kemenkeu.go.id*, KPPN Manado pada zaman Belanda dikenal dengan nama *Central Kantoor Voor De Comptabiliteit* (CKC) yang berdomisili di Tomohon. Melalui sejarah yang panjang, akhirnya pada tahun 2005 ditetapkanlah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, n.d.). KPPN Manado adalah KPPN percontohan tahap 1 bersama 17 KPPN Provinsi lainnya mulai tanggal 30 Juli 2007 (Sampouw & Elim, 2019, p. 4306). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPN Manado tentunya memerlukan barang-barang pendukung kegiatan operasional pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat seperti barang persediaan berupa Kertas, Catridge dan Toner, dan lain-lain.

Bagi perusahaan, persediaan merupakan komponen yang sangat penting dalam neraca dan laporan laba/rugi karena dapat mempengaruhi besaran harga pokok penjualan, aset, dan keuntungan/profit (Sari & Dahria, 2010, p. 3). Bagi pemerintah, sesuai dengan PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan, persediaan merupakan hal yang penting karena berperan sebagai pendukung kegiatan operasional pemerintahan. Tidak hanya sebagai pendukung kegiatan operasional saja, pada Satuan Kerja tertentu, persediaan juga berperan sebagai barang-barang untuk dijual dan/atau diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintahan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat (p. 2).

Dalam pengelolaan dan penatausahaan persediaan, penting untuk tidak mengabaikan kesesuaian penerapan akuntansi persediaan dengan ketentuan yang berlaku, yakni PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, serta regulasi

terkait lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti kesalahan saji atas nilai persediaan yang dapat mempengaruhi opini audit BPK (Antoro, 2017), ketidaksesuaian penerapan akuntansi persediaan di lapangan dengan peraturan yang ada, dan kesalahan-kesalahan lain yang dapat timbul.

Dalam PMK No. 225 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dijelaskan bahwa persediaan merupakan bagian dari aset lancar yang disajikan dalam neraca. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *audited* tahun 2020, saldo persediaan pada neraca berkisar Rp160 triliun atau naik 30% dari saldo persediaan pada neraca tahun 2019 dengan besaran persediaan berkisar Rp123 triliun. Jumlah tersebut tentunya tidak sedikit, dan apabila melihat peningkatan 30% saldo persediaan menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan/pemakaian persediaan bagi instansi pemerintah pusat. Apabila ditarik ke belakang, dalam LKPP *audited* tahun 2016, saldo persediaan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp80 triliun (Antoro, 2017). Artinya saldo persediaan meningkat 99,89% pada tahun 2020 dari saldo persediaan pada neraca LKPP tahun 2016. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dan perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, sejak masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia sampai saat tulisan ini dibuat, banyak lokasi, termasuk di dalamnya KPPN Manado memiliki fasilitas pencegahan penyebaran virus, seperti pengadaan masker, obat-obatan, *thermogun*, dan sebagainya. Hal tersebut dapat menyebabkan penambahan dan/atau perubahan pada kebijakan terkait persediaan pada KPPN Manado. Hal ini sesuai dengan hasil observasi, dalam Neraca Komparasi KPPN Manado TA 2019/2020, terdapat

peningkatan saldo persediaan sebesar 668%, yakni pada tahun 2019 persediaan mempunyai saldo Rp1.681.000 meningkat menjadi Rp12.905.000 pada tahun 2020. Sekalipun nominal persediaan besarnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan jenis aset lainnya dalam neraca, namun oleh karena salah satu perannya adalah sebagai pendukung kegiatan operasional pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, perlu untuk menaruh perhatian dan ketelitian dalam proses pengklasifikasian, pengakuan, penatausahaan, pengukuran, pencatatan, penyajian, pengungkapan, serta perlakuan khusus terhadap barang persediaan.

Berkaitan dengan hal itu, penulis membahas terkait penerapan akuntansi persediaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, penulis memilih judul karya tulis tugas akhir “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Persediaan Pada KPPN Manado”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pengertian persediaan pada KPPN Manado Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat?
2. Apakah klasifikasi persediaan pada KPPN Manado Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat?

3. Apakah pengakuan persediaan pada KPPN Manado Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat?
4. Apakah pengukuran persediaan pada KPPN Manado Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat?
5. Apakah pencatatan persediaan pada KPPN Manado Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan, PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 212/PMK.05/2019 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat?
6. Apakah penyajian dan pengungkapan persediaan pada KPPN Manado Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan KPPN Manado, dan peraturan terkait lain yang berlaku?
7. Permasalahan dan kendala apa saja yang ditemukan dalam penatausahaan dan penerapan akuntansi persediaan di tahun 2020 pada KPPN Manado?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penyusunan karya tulis tugas akhir ini, sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, yaitu antara lain:

1. Meninjau kesesuaian penerapan akuntansi persediaan di KPPN Manado terhadap ketentuan yang berlaku.

2. Mengetahui praktik penerapan akuntansi persediaan dan penatausahaan persediaan secara riil di lapangan terutama pada KPPN Manado.
3. Memperdalam teori mengenai akuntansi persediaan yang telah dipelajari selama perkuliahan.
4. Mengetahui permasalahan dan kendala dalam penerapan akuntansi persediaan khususnya pada KPPN Manado.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini membahas mengenai penatausahaan persediaan pada KPPN Manado dan teori dari akuntansi persediaan seperti pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian berdasarkan PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan dan PMK 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, serta peraturan terkait lainnya seperti Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 212/PMK.05/2019 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat. Selanjutnya, dalam karya tulis ini dilakukan peninjauan kesesuaian penerapan akuntansi persediaan pada KPPN Manado tahun 2020 terhadap ketentuan akuntansi persediaan yang berlaku saat penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat berguna bagi Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai acuan penelitian atau proses pembelajaran mahasiswa. Bagi satuan kerja KPPN Manado, diharapkan karya tulis ini dapat membantu untuk melihat kendala dalam penatausahaan persediaan dan kesesuaian

dalam penerapan akuntansi persediaan, sehingga dapat mengarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai akuntansi persediaan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis memaparkan gambaran dari Karya Tulis Tugas Akhir ini secara umum, antara lain berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori, penulis memaparkan teori-teori yang digunakan penulis sebagai landasan penyusunan karya tulis tugas akhir, yakni teori mengenai akuntansi persediaan. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini antara lain pengertian aset dan persediaan, klasifikasi, penatausahaan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, serta pengungkapan persediaan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab metode dan pembahasan, penulis memaparkan bahasan mengenai metode dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam mempelajari objek penulisan, yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado. Selain itu, penulis juga memaparkan profil dari KPPN Manado beserta kebijakan terkait akuntansi persediaan yang diterapkan pada KPPN Manado di tahun 2020. Dalam rangka menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dari karya tulis tugas akhir ini, dari penerapan akuntansi persediaan tersebut dilanjutkan peninjauan

antara penerapan akuntansi persediaan di KPPN Manado dengan aturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab simpulan merupakan bagian terakhir dari karya tulis tugas akhir ini, yang di dalamnya berisikan kesimpulan atas proses peninjauan penerapan akuntansi persediaan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah karya tulis ini.